



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 60 Tahun 2025, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

WAHYU DINATA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN 2025**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi													TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi													

				Birokrasi dalam satu tahun															
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun	✓														
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		✓		✓	✓								✓		
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian	2. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di					✓									✓	

**TIM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANGAN/
DEREGULASI
KEBIJAKAN**

			kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron															
		2. Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional (SOP) produk hukum	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP					√									√	
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster	√					√									√
			2. Penyesuaian SOTK	2. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat															
			3. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	3. Struktur Organisasi unit/satuan kerja	√														
4.	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-	1. Pengiriman Operator untuk mengikuti Bimtek	1. Operator mengikuti Bimtek					√									√	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN

		<i>government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU</i>	2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								
2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU		1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja	✓									
		2. Pelaksanaan Kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi		✓	✓	✓	✓					✓
		3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID			✓							✓
	3. Penerapan sistem kearsipan	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik			✓							✓

		KPU yang handal	2. Penerapan e-office dalam layanan persuratan	2. Terlaksananya e-office dalam administrasi persuratan	√				√				
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tata laksana KPU	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sosialisasi SOP pada laman website	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun	√				√				
		5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP					√				√
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan Kebutuhan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	Tercapainya restrukturisasi pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota									
		2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)							√				√
		3. Penilaian kinerja pegawai			√	√	√	√					√

		akuntabilitas kinerja	dengan menyusun LAKIP	(LAKIP) yang tepat isi dan waktu																	
7.	Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja																✓	
		2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko	Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP 1. Terlaksananya kegiatan SPIP 2. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	✓																
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**TIM
PENGAWASAN**

			4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat						✓													
8.	Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap KPU	1. Menyusun kebijakan standar pelayanan	Tersedianya standar pelayanan	✓																		
			2. Menyusun maklumat pelayanan informasi sesuai maklumat	Maklumat pelayanan permohonan informasi sesuai maklumat	✓																		
			3. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam satu tempat	✓																		
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu							✓									✓			
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder																		✓	
		3. Kegiatan penguatan		1. Dibentuknya helpdesk	✓																		

**TIM
PELAYANAN
PUBLIK**

		pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat																	
		2. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk															✓				
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan																✓	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Binsar ST Siagian